The Forests Dialogue

# The Forests Dialogue

**MELIBATKAN! MENGEKSPLORASI! MENGUBAH!**

# Perkebunan Kayu di Lanskap Indonesia

SIAK, PELALAWAN DAN PEKANBARU, RIAU, SUMATRA

## 12-16 Juni 2023

## Rangkuman Ketua Bersama Dialog

**Oleh** Marcus Colchester, Lucita Jasmin, Aditya Bayunanda dan Rulita Wijayaningdyah

**KOMITE PENGARAH TFD 2023**

**Ana Bastos**
Urbem – Brazil

**Kerry Cesareo**
WWF – United States

**Marcus Colchester**
Forest Peoples Programme – United Kingdom

**Minnie Degawan**
Re:wild – Philippines

**Gary Dunning**
The Forests Dialogue (TFD) – United States

**Ara Erickson**
Weyerhaeuser – United States

**José Carlos Fonseca**
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) – Brazil

**David Ganz**
RECOFTC – Thailand

**Angela Graham-Brown**
World Business Council for Sustainable Development – Switzerland

**Paula Guimarães**
The Navigator Company – Portugal

**Paul Hartman**
The World Bank – United States

**Victor Lopez**
Ford Foundation – Mexico

**Antti Marjokorpi**
Stora Enso – Finland

**Ivone Namikawa,** TFD Co-Leader
Klabin – Brazil

**Cécile Ndjebet**
African Women's Network for Community Management of Forests (REFACOF) – Cameroon

**Milagre Nuvunga,** TFD Co-Leader
MICAIA Foundation – Mozambique

**Sami Oksa**
UPM – Finland

**Sarah Price**
Sappi – Belgium/Switzerland

**Fernanda Rodrigues**
Brazilian Forest Dialogue (Diálogo Florestal) – Brazil

**Francisco Rodríguez**
CMPC – Chile

**Carolina Toapanta**
BOMACO Foundation – Ecuador

**Marthe Tollenaar**
SAIL Ventures – Netherlands

**Mark Wishnie**
BTG Pactual – United States

**ISI**

I. Pendahuluan ..... 2

II. Konteks Singkat Lanskap Riau & Tujuan Dialog ..... 3

III. Kunjungan Lapangan ..... 7

IV. Ringkasan Dialog ..... 9

A. Kata Pengantar ..... 9

B. Menganalisis Tantangan-Tantangan di Empat Tema ..... 9

C. Strategi Untuk Mengatasi Tantangan-Tantangan Prioritas ..... 11

V. Kesimpulan ..... 16

Lampiran A: Pembelajaran Dan Refleksi Dari Kunjungan Lapangan Ketua Bersama ..... 19

Lampiran B: Poin-Poin Diskusi Tentang Empat Tantangan Utama ..... 22

**Peserta dialog mengunjungi kampung adat Suku Anak Rawa.**

The Forests Dialogue, Yale University, 360 Prospect Street, New Haven, Connecticut, 06511, USA
O: +1 203 432 5966 T: @forestsdialogue W: www.theforestsdialogue.org E: info@theforestsdialogue.org

## I. PENDAHULUAN

Dialog Perkebunan Kayu di Lanskap (TPL) yang diselenggarakan Forest Dialogue (TFD) di Indonesia merupakan dialog keempat dalam rangkaian dialog lapangan TPL. TFD meluncurkan Inisiatif TPL pada bulan September 2015 untuk menelaah perkembangan permasalahan terkait perkebunan kayu dan hutan tanaman dalam konteks lanskap yang lebih luas melalui pelibatan kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama di tingkat internasional dan lokal. Dialog lapangan TPL pertama diadakan di Chile pada tahun 2016, dan sejak itu dialog telah diadakan di Brazil dan Selandia Baru.

**Peserta dialog.**

Inisiatif TPL dibangun berdasarkan Inisiatif Hutan Tanaman yang Dikelola Secara Intensif (IMPF) milik TFD (2005-2008), yang meninjau kembali isu-isu dan lokasi tertentu untuk memahami bagaimana praktik-praktik tersebut telah berkembang dan tantangan-tantangan baru apa yang muncul. Pada tahun 2007, TFD mengadakan dialog IMPF Indonesia yang disertai dengan kunjungan lapangan ke Pekanbaru, Riau, untuk mengidentifikasi kondisi di mana IMPF dapat memberikan perpaduan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang optimal dan adil baik secara lokal maupun global. Dialog tersebut bertujuan untuk memperluas pengetahuan para peserta mengenai IMPF dan berkontribusi pada diskusi kebijakan nasional mengenai peran IMPF dalam memenuhi kebutuhan Indonesia akan serat di masa depan serta tujuan konservasi sosial dan lingkungan lainnya.

Inisiatif TPL dikembangkan untuk meninjau kembali masalah-masalah yang diangkat dalam dialog-dialog IMPF dan meningkatkan diskusi melalui dialog lapangan yang membahas topik-topik utama terkait hutan tanaman, seperti berikut ini:

- Desain dan implementasi hutan tanaman dalam konteks pendekatan yurisdiksi dan lanskap;
- Pendekatan untuk memungkinkan tata kelola yang baik dan pembangunan inklusif serta memahami potensi hutan tanaman untuk berkontribusi pada agenda pembangunan global;
- Eksternalitas kunci yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman;
- Penerapan solusi-solusi praktis baru terhadap tantangan-tantangan kontekstual tertentu (termasuk pengelolaan lahan gambut, penguasaan lahan dan penyelesaian sengketa, perhutanan sosial, dan restorasi bentang alam)
- Diversifikasi bentuk dan komposisi spesies hutan tanaman, keberlanjutan sistem kehutanan tanaman dan akses ke dan penggunaan teknologi baru.

Tujuan dari dialog TPL tahun 2023 ini, yang diselenggarakan bersama oleh TFD, APRIL, WWF-Indonesia, Forest Peoples Programme, Bahtera Alam dan RECOFTC, adalah untuk menindaklanjuti tujuan dan keberhasilan inisiatif IMPF yang teramati, mengidentifikasi apa yang dapat ditingkatkan dan bagaimana kebijakan dapat berkembang untuk mendukung keberlanjutan, dan menetapkan tujuan-tujuan baru dengan mempertimbangkan perubahan dalam konteks sosio-politik dan lingkungan. Dialog lapangan multipihak ini mempertemukan sekitar 30 pakar, pemangku kepentingan, dan pemegang hak dari Indonesia dan 20 dari dunia internasional pada bulan Juni 2023. Dialog tersebut mencakup sesi pleno dan sesi-sesi kelompok kerja kecil serta kunjungan lapangan untuk mendengar langsung dari peserta setempat tentang tantangan sosial dan lingkungan di lapangan. Dokumen ini menguraikan diskusi-diskusi penting, wawasan, dan kesimpulan dari dialog tersebut, serta menyoroti beberapa langkah yang mungkin dilakukan untuk bergerak maju ke depan.

**Peserta dialog mengunjungi hutan desa.**

## II. KONTEKS SINGKAT LANSKAP RIAU & TUJUAN DIALOG

Provinsi Riau adalah rumah bagi sekitar 22 juta orang, termasuk masyarakat yang menghuni tanah adat, baik yang diakui maupun yang tidak. Riau juga kaya akan sumber daya alam dan ekosistem penting, termasuk lahan gambut yang luas. Sekitar 5,09 juta hektar atau 56,42% luas wilayah provinsi ini merupakan lahan gambut,1 yang tersebar di 59 Kesatuan Hidrologi Gambut di 11 kabupaten/kota, dimana 2,4 juta ha diantaranya dilindungi hukum.[2] Riau juga memiliki wilayah pesisir yang kaya akan hutan bakau (seluas sekitar 126.000 ha). Berdasarkan analisis Global Forest Watch, tutupan hutan alam telah berkurang sebesar 52% antara tahun 2002 dan 2022.[3] Kebakaran hutan dan lahan gambut masih sering terjadi di Riau dan berdampak buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun jumlah kebakaran dan area yang terbakar terus menurun sejak 2019.

---

1 DISLHK (riau.go.id)

2 Media Center|Infrastruktur Pembasahan Gambut Dibangun di Pelalawan dan Rokan Hilir Riau

3 https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/24/?category=forest-change&location=WyJjb3VudH-J5IiwiSUROIiwiMjQiXQ%3D%3D

Penggunaan lahan yang paling utama di provinsi ini adalah untuk tanaman pertanian dan perkebunan tanaman industri. Sekitar 1 juta ha digunakan untuk perkebunan rakyat kecil, terutama kelapa sawit, dan 1,3 juta ha digunakan untuk perkebunan kayu pulp. Riau juga memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data resmi, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 14,9 juta ha dimana 2,9 juta ha di antaranya berada di Riau. Provinsi ini juga dilintasi jaringan pipa dari sumur minyak dan gas.

**Gamma Galudra memaparkan makalah latar belakang.**

Perkebunan kayu dan industri-industri terkait memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan nasional dan provinsi. Namun, perkebunan-perkebunan juga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Dialog TPL ini menanggapi kebutuhan untuk memastikan bahwa industri perkebunan dapat mendukung perekonomian pedesaan, sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan menjaga lingkungan.

Ada peluang tepat waktu bagi industri perkebunan kayu di Indonesia untuk menanggapi seruan dari para pembuat kebijakan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan praktik mereka. Misalnya, beberapa perusahaan kehutanan mulai mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial yang lebih baik dalam menanggapi peluang baru untuk bergabung kembali (re-asosiasi) dengan Forest Stewards Council, jika persyaratan remediasi lingkungan dan sosial terpenuhi. Ada juga momentum besar dari sektor swasta untuk terlibat dalam upaya restorasi, serta pengelolaan perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan. Selain itu, ada peningkatan kesadaran akan peran kolaborasi lanskap multipihak, dengan pembelajaran penting dan praktik terbaik yang dapat dibagikan dari dalam Riau, di seluruh negeri, dan secara global. Jalan-jalan menuju dialog antar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dan terkena dampak perkebunan kayu dapat memainkan peran penting untuk memaksimalkan hasil rekonsiliasi sosial dan lingkungan, dan yang lebih luas lagi, untuk dapat memahami dengan lebih baik lagi peran dan kontribusi hutan tanaman di Indonesia dan potensinya.

Pertanyaan-pertanyaan pemandu utama yang dikembangkan oleh Kelompok Penasihat Dialog TPL sehubungan dengan dinamika ini mencakup:

- **Bagaimana perkebunan kayu dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia dan Riau serta komitmen-komitmen lainnya,** seperti tujuan-tujuan yang berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk menekan deforestasi, mengurangi gas rumah kaca, dan melindungi keanekaragaman hayati?[4]

4 Tujuan dan komitmen tersebut mencakup Rencana Operasional Penyerapan Bersih (*Net Sink*) Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) Indonesia tahun 2030, yang mengamanatkan perwujudan penyerapan karbon bersih (*net carbon sink*) di sektor kehutanan Indonesia pada tahun 2030; Target penurunan emisi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional; dan komitmen untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati darat dan laut melalui Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal

- **Bagaimana perkebunan kayu dapat mendukung persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,** penerapan kerangka remediasi Forest Stewardship Council (FSC), dan peraturan baru Uni Eropa yang mewajibkan verifikasi bahwa barang-barang perdagangan/ produksi tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah tahun 2020?

- **Klaim dan konflik antara perusahaan swasta dan masyarakat setempat masih terjadi karena berbagai faktor,** termasuk kapasitas pemerintah untuk menangani klaim dan sengketa atas pengakuan klaim tanah dan sumber daya oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Bagaimana industri dan komunitas lokal dapat mencapai kemajuan yang lebih pesat dalam menyelesaikan klaim dan konflik tersebut?

- **Target provinsi untuk restorasi ekosistem di Riau adalah 611.000 ha, yang sebagian besar berlokasi di luar konsesi kehutanan dan perkebunan.**[5] Pengelolaan gambut berbasis masyarakat dapat memainkan peran kunci untuk mewujudkan target tersebut. Bagaimana perusahaan perkebunan kayu dapat memperkuat inisiatif-inisiatif seperti itu termasuk melalui promosi dan dukungan kemitraan masyarakat-dunia usaha?

- **Apa yang dapat dipelajari dari inisiatif-inisiatif lokal seperti forum multipihak Siak Hijau (*Green Siak*) dan Riau Hijau (*Green Riau*)?** Bagaimana program-program penting ini dapat diperkuat?

- **Bagaimana perkebunan kayu dan industri-industri terkait berkontribusi terhadap semakin berkembangnya peran pasar karbon dan kredit karbon hutan?** Apa dampaknya terhadap tekanan penggunaan lahan?

**Ketua Dialog Marcus Colchester berbagi refleksi dari dialog IMPF tahun 2007.**

Selain untuk menjawab tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan baru ini, dialog ini juga bertujuan untuk meninjau kembali masalah-masalah yang diangkat dalam dialog IMPF Indonesia tahun 2007. Peluang dan tantangan lingkungan dan sosial prioritas yang diidentifikasi oleh para peserta dialog IMPF tahun 2007 lebih difokuskan pada kekhawatiran akan konversi hutan alam, dibandingkan promosi perkebunan di lahan yang sebelumnya mengalami deforestasi atau terdegradasi. Para peserta juga mengidentifikasi konflik manusia-satwa liar dan kemungkinan punahnya satwa liar akibat hilangnya habitat harimau Sumatra dan gajah Sumatra sebagai isu penting. Saat itu, Hutan Bernilai Konservasi Tinggi digunakan sebagai alat untuk memitigasi konversi hutan. Masalah-masalah sosial mencakup

5 Bagaimana Upaya Restorasi Gambut dan Mangrove di Riau? - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id

marginalisasi masyarakat akibat tidak terjaminnya penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan serta persaingan untuk lahan dan mata pencaharian antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Para peserta mengidentifikasi konflik sosial sebagai akibat dari tata kelola yang tidak memadai dan ketergantungan yang berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan dalam tata kelola. Selain itu, para peserta juga mengamati praktik-praktik dunia industri seperti tingginya penggunaan tenaga kerja subkontrak, perluasan kapasitas pabrik mendahului sumber pasokan serat berkelanjutan berpotensi menyebabkan konversi hutan lebih lanjut, dan perjanjian kontrak dengan masyarakat setempat dan perusahaan swasta untuk bahan baku yang memasok pabrik. Solusi-solusi yang diusulkan terhadap tantangan dan peluang yang diuraikan di atas disusun berdasarkan tiga tema utama sektor swasta sebagai wahana bagi pembangunan berkelanjutan: penguatan penguasaan lahan dan hak guna lahan; dan strategi untuk mengurangi risiko konversi hutan, termasuk proses-proses berbasis lanskap.

**Peserta dialog belajar tentang HTI di tanah mineral.**

## III. KUNJUNGAN LAPANGAN

Para peserta menghabiskan waktu dua hari untuk mengunjungi lokasi lapangan yang disusun seputar tema pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab, dinamika lanskap, produksi berkelanjutan dalam konteks pendekatan lanskap dan yurisdiksi, solusi iklim berbasis alam, perhutanan sosial, serta model resolusi penguasaan lahan dan sengketa. Operasi, kebijakan, dan praktik pengelolaan APRIL ditampilkan sebagai contoh dari operasi perkebunan kayu yang dikelola secara intensif di suatu lanskap, sementara dialog ditujukan untuk merefleksikan perkebunan kayu secara umum dan dalam konteks lanskap. Di bawah ini adalah uraian singkat mengenai hari-hari kunjungan lapangan dialog tersebut. Penjelasan lengkap dari setiap kunjungan lapangan dapat ditemukan di situs web TFD. Refleksi ketua bersama terhadap kunjungan lapangan tersebut khususnya mengenai perubahan lanskap sosial dan ekologi sejak kunjungan lapangan terakhir selama dialog IMPF pada tahun 2007 dapat dilihat di Lampiran I.

**Kunjungan bersama pimpinan Kampung Adat dan Ketua Lembaga Adat Melayu Siak.**

Hari pertama kunjungan lapangan utamanya diisi dengan kunjungan ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kawasan produksi dan konservasi yang dikelola oleh APRIL. APRIL mengelola konsesi lahan yang luas dengan perkebunan kayu keras, fasilitas pabrik terintegrasi, dan kawasan konservasi. Para peserta mengunjungi Pembibitan Sentral Kerinci (*Kerinci Central Nursery*), di mana mereka belajar tentang upaya APRIL dalam mengelola dan meningkatkan efisiensi produksi bibit berkualitas, menangani hama dan penyakit, dan menerapkan teknik kultur jaringan inovatif untuk produksi bibit. Operasi Kehutanan di Perkebunan Lahan Gambut dan Tanah Mineral milik APRIL juga dieksplorasi, menggarisbawahi pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab dan produksi berkelanjutan.

Kunjungan ini menyoroti pentingnya kehutanan presisi, program pemuliaan pohon, dan pengelolaan hama terpadu untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dan meminimalkan dampak lingkungan. Kunjungan ke Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi menunjukkan perbedaan antara penanaman pohon (perkebunan kayu) dan hutan alam. APRIL berpartisipasi aktif dalam Jaringan NKT (HCV Network) dan memiliki lebih dari 210.000 hektar kawasan konservasi. Kunjungan ini menjelaskan beberapa kekuatan dan tantangan dalam penilaian, perlindungan, dan pengelolaan kawasan NKT, serta investasi finansial yang diperlukan untuk upaya konservasi. Pengelolaan Air dan Pemantauan Gas Rumah Kaca juga dibahas di lokasi produksi APRIL. Kunjungan ini menyoroti pentingnya pengelolaan air yang efektif, khususnya di perkebunan lahan gambut. APRIL juga mendukung ilmu pengetahuan yang mengesankan dalam pemantauan dan analisis emisi gas rumah kaca. Temuan-temuan ini, yang dipublikasikan di Nature, menunjukkan tingginya emisi dari lahan gambut yang terdegradasi, emisi yang menurun namun tetap signifikan dari lahan gambut yang ditanami pohon Akasia, dan emisi yang signifikan dari lahan gambut yang masih asli, menyiratkan bahwa pemanasan global telah mengubah apa yang tadinya merupakan penyerap kini menjadi penghasil emisi GRK.[6]

**Peserta internasional dari Amerika Latin belajar tentang penanaman pohon di Indonesia.**

Kunjungan hari ke-2 difokuskan pada dampak sosial industri perkebunan kayu terhadap komunitas lokal. Kunjungan ke Kawasan Konservasi Masyarakat di Dayun memberikan contoh bagaimana perusahaan dan masyarakat dapat bekerja sama, melalui peningkatan kapasitas dan insentif, untuk mencegah kebakaran dan mendorong konservasi tutupan hutan oleh masyarakat. Saat makan siang yang diselenggarakan Desa Adat Penyengat, yang terletak di wilayah adat masyarakat adat Suku Anak Rawa,[7] beberapa perwakilan masyarakat menyoroti perselisihan dan keluhan yang terus berlangsung dengan perkebunan APRIL dan infrastruktur terkait, serta kekhawatiran masyarakat yang lebih luas terhadap konsesi penebangan kayu komersial dan perkebunan kelapa sawit yang juga berada di lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat setempat. Kunjungan ke kampung Melayu bernama Kampung Tengah, menyoroti contoh desa adat yang masih mempertahankan kepemimpinan dan lembaga adatnya dan secara resmi diakui sebagai desa adat oleh pemerintah kabupaten, namun tidak memiliki sertifikat formal atas tanah dan hutan adat (tanah ulayat) dan tanah pertanian adat mereka (tanah adat).[8]

---

6 Deshmukh et al 2023. Net greenhouse gas balance of fibre wood plantation on peat in Indonesia. Nature 616, 740-746.

7 Colchester et al 2023. Customary Rights in APRIL plantations: Findings from a field study. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/customary-rights-april-plantations

8 Rencana untuk mengunjungi perkebunan kelapa sawit petani kecil untuk belajar mengenai keputusan petani kecil terkait kelapa sawit dan membahas tren-tren lanskap yang lebih besar yang berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah terpaksa dibatalkan karena sempitnya waktu.

## IV. RINGKASAN DIALOG

### A. Kata Pengantar

Saat menyambut para peserta dialog sebelum kunjungan lapangan, Anderson Tanoto, CEO APRIL, menyatakan bahwa sejak tahun 2013 seluruh grup Royal Golden Eagle (Raja Garuda Emas) telah melalui perjalanan besar untuk menghentikan pengembangan lewat deforestasi di seluruh operasi dan rantai pasoknya, yang mencakup Indonesia, Tiongkok, Brazil dan Kanada, serta Spanyol, termasuk dalam produksi pulp, pulp larut, kertas kualitas khusus, bioenergi, minyak sawit dan juga energi tak terbarukan seperti LPG. Hal ini terjadi bukan hanya karena tekanan para pemangku kepentingan seperti Greenpeace dan WWF, namun juga karena komitmen mereka sendiri. RGE telah berhasil mewujudkan hal ini melalui peningkatan produktivitas yang signifikan dari perkebunan yang ada dan, selain itu, telah menyisihkan 400.000 ha untuk konservasi termasuk kawasan restorasi ekosistem seluas 150.000 ha di Semenanjung Kampar. Kawasan tambahan untuk konservasi dan restorasi saat ini sedang diidentifikasi di Kalimantan. Perusahaan juga berupaya mencapai nol emisi Gas Rumah Kaca dari pabrik-pabriknya dan dari operasinya yang lebih luas melalui investasi pada sumber-sumber energi terbarukan termasuk tenaga surya dan pemanfaatan produk limbah. Di British Columbia, Kanada, RGE mempunyai proyek yang disetujui oleh masyarakat adat di sana (yang di sebut *First Nations*) untuk mengimbangi emisi LPG dengan tenaga air. RGE beroperasi berdasarkan '5 hal': Komunitas, Negara, Iklim, Pelanggan dan Perusahaan. Prinsipnya adalah jika empat hal pertama bisa diatasi, maka hal kelima akan menguntungkan dan berkelanjutan.

**Ketua Bersama Dialog Penanaman Pohon dalam Lanskap Indonesia.**

Saat membuka dialog dua hari di Pekanbaru setelah kunjungan lapangan, juru bicara Gubernur juga menyambut para peserta, dan menyatakan bagaimana Riau telah memulai perjalanan menuju keberlanjutan melalui program Riau Hijau. Ia menyatakan bahwa upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan memerlukan dialog inklusif, dan ia berharap pertemuan ini dapat berkontribusi pada tujuan tersebut.

### B. Menganalisis Tantangan-Tantangan di Empat Tema

Dialog hari pertama di Pekanbaru diawali dengan sesi refleksi dari para ketua bersama dan peserta terhadap pengamatan mereka selama dua hari kunjungan lapangan. Ada empat tema tantangan yang diamati: Produksi Berkelanjutan dan Intensifikasi; Masalah-Masalah Sosial; Pengelolaan Lahan Gambut dan Iklim; dan Restorasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sesi II difasilitasi dalam diskusi kelompok

kecil untuk mensintesis tantangan-tantangan utama di bawah ini yang muncul dalam tiap-tiap tema. (lihat Lampiran B untuk poin-poin pembahasan yang lebih lengkap)

Di tema **Produksi Berkelanjutan dan Intensifikasi**, para peserta membahas dampak lingkungan dari perkebunan kayu terhadap lahan gambut; tantangan monokultur eksotik;menurunnya kesuburan tanah; terbatasnya perkebunan kayu petani kecil dan lemahnya penerapan opsi-opsi hutan kemasyarakatan; kurangnya berbagi pengetahuan/ilmu pengetahuan mengenai hama & penyakit dan silvikultur; dampak lingkungan dari kelapa sawit; dan bagaimana praktik perkebunan kayu dapat merespons wacana-wacana perubahan iklim.

**Ketua Bersama Dialog Penanaman Pohon dalam Lanskap Indonesia.**

**Ketua dialog, Aditya Bayunanda, berbagi refleksi tentang bagaimana mengelola NKT di dalam landskap.**

Tantangan-tantangan utama dalam **Masalah-Masalah Sosial** cukup beragam: kurangnya pengakuan atas hak-hak adat dan ketidakpastian penguasaan lahan; kurangnya komunikasi, kepercayaan dan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat; dampak negatif perkebunan kayu dan kelapa sawit terhadap masyarakat; perlunya pembangunan masyarakat; menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan serikat pekerja untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan; pengakuan dan dukungan terhadap budaya dan identitas adat; perlunya memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, peraturan yang berdampak pada mereka dan peluang-peluang; serta kurangnya kolaborasi antar aktor dalam lanskap yang menghadapi dampak dan tantangan sosial serupa.

Tema **Pengelolaan Lahan Gambut dan Iklim** mengamati: kurangnya pengelolaan lahan gambut terpadu dalam lanskap; kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan lanskap mengenai nilai gambut; kesenjangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan mengenai ekologi, iklim dan pengelolaan lahan gambut; kurangnya kesadaran mengenai model sumber penghidupan berbasis lahan gambut yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang paling sesuai.

Tema **Restorasi dan Konservasi** membahas: konflik manusia-satwa liar; tantangan dalam mengukur dan menilai keanekaragaman hayati; perlunya mengoptimalkan rencana tata ruang kawasan konservasi dan

perkebunan kayu dalam suatu lanskap; perlunya keterlibatan masyarakat yang efektif dan adil dalam restorasi, konservasi dan pengelolaan lahan gambut; ketidakpastian dan munculnya peluang-peluang pasar karbon.

## C. Strategi Untuk Mengatasi Tantangan-Tantangan Prioritas

Dari tantangan-tantangan yang muncul dari diskusi-diskusi kelompok kecil di Sesi II, para peserta kemudian melakukan penentuan prioritas untuk memilih tantangan-tantangan utama yang menjadi fokus diskusi mengenai solusinya. Para peserta kemudian mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi spesifik untuk mengatasi tantangan-tantangan utama yang diprioritaskan ini.

**Peserta memilih tantangan prioritas mereka di seluruh tema utama.**

Dalam tema **produksi berkelanjutan dan intensifikasi**, para peserta memprioritaskan tantangan i) dampak lingkungan dari perkebunan kayu di lahan gambut dan ii) terbatasnya perkebunan kayu oleh petani kecil dan lemahnya penerapan opsi kehutanan masyarakat.

- Untuk mengatasi **dampak lingkungan dari perkebunan kayu**, para peserta mengidentifikasi perlunya pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis dampak melalui kemitraan penelitian dan berbagi pengetahuan di seluruh lanskap dan yurisdiksi yang lebih luas sehingga akar permasalahannya dapat diatasi. Dampak yang perlu dipahami lebih baik mencakup emisi GRK, keanekaragaman hayati, kualitas air dan udara, kualitas tanah, dampak ekologi dan dampak pada masyarakat. Pentingnya pemantauan berbasis masyarakat, ilmu pengetahuan warga, dan menghargai pengetahuan lokal disoroti untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat yang lebih dalam agar dapat merespons dampak lingkungan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, para peserta merekomendasikan perluasan kawasan konservasi dan konektivitas, peningkatan keanekaragaman pohon di zona penyangga, peningkatan luas lahan untuk metode produksi tradisional yang membawa dampak lingkungan yang lebih kecil seperti pengelolaan sagu, diversifikasi spesies pohon yang digunakan, termasuk investasi dalam penggunaan spesies asli, dan pembelajaran dari kawasan lahan gambut lainnya.

- Strategi untuk **mengatasi terbatasnya perkebunan kayu petani kecil dan lemahnya implementasi kehutanan masyarakat** difokuskan pada pendalaman kerjasama antara perusahaan dan petani kecil agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perhutanan sosial dapat bergerak maju. Hal ini termasuk memungkinkan pengembangan perizinan, pemasaran dan usaha. Terdapat hambatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam perhutanan sosial, salah satunya adalah perlunya untuk mempercepat pengakuan pemerintah atas hak tenurial

perhutanan sosial. Peraturan-peraturan perhutanan sosial perlu disederhanakan dan pendanaan publik untuk perhutanan sosial perlu diperluas. Masyarakat memerlukan dukungan untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh izin hutan kemitraan, hutan masyarakat dan perhutanan sosial, misalnya dalam pengembangan rencana pengelolaan. Yang terpenting, ada pembelajaran dari koperasi-koperasi petani kecil di Siak yang telah dan terus mempromosikan perhutanan sosial. Standar dan pendekatan petani kecil FSC dan PEFC harus diuji di Indonesia dan para peserta menyarankan untuk mengajak beberapa komunitas di Riau untuk bersama-sama mengerjakan hal ini sebagai kelompok yang lebih besar. Rekomendasi-rekomendasi khusus untuk kolaborasi mencakup penyediaan lahan bagi masyarakat untuk dikelola bagi kehutanan dan pertanian; perjanjian tertulis yang jelas; dukungan bagi produksi pertanian dan wanatani lokal termasuk rencana pemasaran, usaha, dan pengelolaan hutan, serta bekerja bersama masyarakat untuk memulihkan dan menghubungkan koridor keanekaragaman hayati di lahan yang dikelola atau diklaim masyarakat. Para peserta menyarankan untuk memulai dengan sumber daya setempat yang tersedia dan memperkuat kelompok petani yang sudah ada.

**Ketua Dialog, Rulita Wijayaningdyah, memimpinkan diskusi kelompok.**

Dari tantangan-tantangan yang teridentifikasi terkait **masalah-masalah sosial**, para peserta memprioritaskan i) kurangnya pengakuan terhadap hak-hak adat dan ketidakpastian penguasaan lahan, ii) kurangnya komunikasi, kepercayaan, dan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat, dan iii) perlunya menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan serikat pekerja untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan. Dua rekomendasi global muncul di semua masalah-masalah sosial. Pertama, para peserta mengusulkan agar membentuk sebuah platform, seperti Dialog Hutan Sumatra, dengan komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun kepercayaan lintas sektor dengan perwakilan dari berbagai aktor dan pemerintah. Kedua, perlunya pelatihan bagi komunitas, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik.

- Untuk mengatasi **kurangnya pengakuan terhadap hak-hak adat**, para peserta menggarisbawahi perlunya menyusun sebuah rencana aksi praktis dan linimasa. Rencana tersebut harus mencakup dokumentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui survei, mengakui bahwa masyarakat itu berbeda-beda, dan ruang lingkup harus diberikan untuk memahami dan mencakup warga masyarakat yang kurang beruntung. Rencana ini juga harus mencakup penyelesaian konflik yang difasilitasi oleh pemerintah setempat dan pelatihan penyelesaian konflik, klarifikasi antara hak penggunaan lahan dan hak atas tanah dalam hak adat, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah termasuk dalan hak-hak adat perlu

diperkuat. Para peserta menekankan peran besar yang dapat dimainkan oleh sektor swasta dalam memajukan hak-hak masyarakat termasuk dengan mendeklarasikan komitmen mereka terhadap pengakuan dan penghormatan, disertai rencana aksi praktis dan linimasa untuk mencapai hal ini, serta melalui proses FSC dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perencanaan penggunaan lahan, termasuk hak-hak adat.

- Untuk mengatasi **kurangnya komunikasi, kepercayaan dan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat**, para peserta menekankan perlunya perusahaan untuk memperjelas mekanisme pengaduan mereka dan menindaklanjuti komitmen-komitmen mereka. Perusahaan harus mengembangkan rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek dengan desa-desa yang terdampak operasi mereka dan perlu ada pemetaan untuk memperjelas batas-batas konsesi dan klaim lahan. Penghubung perusahaan dan perwakilan masyarakat membutuhkan pelatihan untuk dapat mengembangkan kesepakatan yang kredibel dan sah yang kemudian diperiksa di jajaran tingkat tinggi perusahaan dan masyarakat. CSR harus transparan dan dilaporkan secara berkala untuk verifikasi. Pemerintah setempat mempunyai peran yang kuat melalui pemberian penghargaan dan hukuman terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan. Harus ada strategi komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat. Untuk mekanisme pengaduan yang kredibel, masyarakat perlu menyepakati bagaimana mereka akan diwakilkan. Masyarakat harus terwakili dalam komite keberlanjutan dan para eksekutif senior harus bertemu dengan desa-desa di lapangan. Masyarakat juga membutuhkan pelatihan tentang FPIC yang disesuaikan dengan situasi setempat, dan para akademisi juga harus diikutsertakan.

**Peserta mengunjungi lokasi pengelolaan air lahan gambut.**

- Untuk **menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan serikat pekerja guna meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan**, para peserta dialog menekankan bahwa perusahaan perlu bekerja sama dengan serikat pekerja yang kredibel dan sah sesuai dengan peraturan. Pekerja memerlukan pelatihan mengenai hak-hak mereka, keberlanjutan usaha, dan penguasaan lahan masyarakat. Perekrutan komunitas lokal harus diprioritaskan termasuk kebijakan yang jelas mengenai perekrutan tenaga kerja lokal, penyediaan beasiswa dan pelatihan kejuruan bagi siswa setempat yang ditujukan agar pekerjaan tidak perlu dialihdayakan (*outsourcing*), dan penyediaan pelatihan kerja untuk posisi-posisi manajemen yang kompetitif. Perusahaan harus

menghindari mempekerjakan penduduk lokal sebagai pekerja harian tidak terampil dan menghindari penggunaan tenaga kerja subkontrak dengan kondisi kerja yang buruk.

Dalam **tema pengelolaan lahan gambut dan iklim**, para peserta memprioritaskan i) kurangnya pengelolaan lahan gambut yang terpadu dalam lanskap dan ii) perlunya sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan dari lahan gambut. Hal mendasar dalam melakukan pendekatan terhadap lahan gambut adalah mengakui bahwa lahan gambut harus diperlakukan sebagai satu unit hidrologi, bukan sebagai lahan-lahan terpisah.

- Para peserta menekankan bahwa untuk mendorong **pengelolaan lahan gambut terpadu** diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai pembelajaran dan praktik-praktik yang direkomendasikan untuk lahan gambut dan pendekatan lanskap terpadu. Secara khusus, pemahaman proses alami dari berbagai suksesi harus menjadi masukan dalam pedoman restorasi lahan gambut. Masyarakat telah mampu mengelola lahan gambut selama berabad-abad dan memiliki pengetahuan serta keterampilan lokal untuk dibagikan. Forum meja bundar atau forum multipihak dengan peran pemerintah yang kuat dapat memfasilitasi berbagi informasi mengenai rencana dan solusi pengelolaan lahan gambut.

- **Meningkatkan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan dari lahan gambut** memerlukan proses partisipatif dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab. Para peserta merefleksikan perlunya mengidentifikasi alternatif pengganti kelapa sawit yang bisa menjaga permukaan air. Pendekatan ini harus mempertimbangkan keseluruhan rantai nilai dan pengembangan pasar serta memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di lanskap tersebut. Pilihan mata pencaharian mencakup wanatani, penyeimbangan karbon (carbon offset), kredit keanekaragaman hayati, mata pencaharian nonlahan, dan penggunaan lahan gambut basah (paludikultur). Kemitraan dengan perusahaan harus melampaui tingkat percontohan untuk meningkatkan solusi yang berhasil dan mempertimbangkan pembagian manfaat yang adil dan merata di masyarakat.

**Diskusi kelompok kecil pada hari terakhir dialog.**

Dalam tema **restorasi dan konservasi**, para peserta mengedepankan tantangan i) mengukur dan menilai keanekaragaman hayati (kesulitan, biaya, kredit keanekaragaman hayati) dan ii) perlunya keterlibatan masyarakat yang efektif dan adil dalam pengelolaan lahan gambut, restorasi, dan konservasi.

- Untuk dapat **mengukur dan menilai keanekaragaman hayati** secara efektif di dalam lanskap, para peserta menyarankan agar pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati multi-pihak dilakukan terlebih dahulu, termasuk pemantauan berbasis masyarakat dengan MoU

yang disepakati, Indikator Kinerja Utama yang dikembangkan bersama, dan kaitan dengan penilaian. Hal ini akan memerlukan lebih banyak hubungan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan peneliti. Untuk penilaian moneter terhadap keanekaragaman hayati, para peserta mengidentifikasi peluang untuk bioprospeksi, misalnya identifikasi dan dokumentasi tanaman obat lokal dan kegunaannya. Mereka menegaskan, hal ini memerlukan hak milik dan hak paten yang kuat agar manfaatnya sampai ke masyarakat. Para peserta mendorong kemitraan multipihak untuk melakukan penyeimbangan (offset) karbon atau keanekaragaman hayati, sehingga hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat lokal dan menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan di hilir. Mereka juga membahas bagaimana mendorong pemangku kepentingan lokal dan warga masyarakat untuk menghargai keanekaragaman hayati dan mendorong pendekatan yang dimulai dengan kesejahteraan masyarakat dan koeksistensi antara alam dan manusia. Tokoh-tokoh unggulan dari masyarakat setempat harus diidentifikasi untuk memastikan pengetahuan ekologi lokal dilestarikan dan digunakan secara efektif.

**Peserta dialog terlibat dalam diskusi kelompok kecil.**

- Untuk mendukung **keterlibatan masyarakat yang efektif dan adil dalam restorasi, konservasi, dan lahan gambut** para peserta menyarankan kolaborasi yang partisipatif dan terstruktur antara perusahaan dan masyarakat melalui MoU dan berbagai pilihan insentif dan kompensasi. Selama dialog, kami belajar tentang keberhasilan model konservasi dan restorasi masyarakat milik APRIL yang harus ditiru dan dikembangkan oleh perusahaan dan pelaku lanskap lain. Secara khusus, pemahaman tentang teknologi dan model pembiayaan yang sesuai harus dibagikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang untuk mengidentifikasi koridor-koridor dan prioritas restorasi. Masyarakat membutuhkan pendidikan mengenai ekosistem, pengelolaan, sejarah, dan pencegahan kebakaran lahan gambut, yang dapat disampaikan secara formal dan informal.

## V. KESIMPULAN

Dialog lapangan ini merupakan yang keempat yang diselenggarakan oleh TFD di Riau, dan merupakan dialog kedua yang secara khusus membahas perkebunan kayu, dan dialog ini menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dalam praktik di lapangan maupun dalam evolusi kebijakan, dan pada saat yang sama mengungkapkan bahwa masih ada beberapa permasalahan yang mengakar dan serius yang harus diatasi.

**Peserta dialog belajar tentang praktik pengelolaan air di lahan gambut.**

Secara umum, sisi positifnya adalah adanya peningkatan kesadaran di antara seluruh pemangku kepentingan akan perlunya mengembangkan solusi skala lanskap atau yurisdiksi yang mencakup berbagai sektor – terutama perkebunan kayu, kelapa sawit, dan industri ekstraktif. Deforestasi telah melambat dan restorasi lahan gambut kini menjadi prioritas politik, meskipun masih belum direalisasikan dalam skala yang lebih besar di seluruh lanskap. Kesadaran yang semakin besar juga telah muncul bahwa pengembangan perkebunan perusahaan harus diimbangi dengan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengamankan aset lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan pada saat yang sama, menjunjung tinggi hak masyarakat dan pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dialog ini diselenggarakan bersama oleh APRIL dan berfokus pada operasi, komitmen, inisiatif perusahaan , dan tantangan berkelanjutan yang dihadapi perusahaan terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan keterlibatan dengan masyarakat di lanskap tersebut. Kemajuan yang mengesankan telah dicapai oleh perusahaan dalam hal intensifikasi produksi dari perkebunan yang ada, mengamankan area sisihan Nilai Konservasi Tinggi, pengelolaan permukaan air, pencegahan kebakaran, penerapan kemajuan teknologi dalam operasi perusahaan (misalnya mekanisasi, kultur jaringan, perencanaan tata ruang, gas rumah

kaca), uji coba kemitraan konservasi masyarakat, dan investasi dalam pengelolaan dan perlindungan program restorasi lahan gambut skala besar. Pabrik kertas dan pulp yang ada sekarang memiliki pasokan serat yang aman yang didatangkan perkebunan-perkebunan milik perusahaan sendiri dan pemasok langganannya. APRIL menyatakan bahwa pabrik papan (board) baru yang saat ini sedang dibangun di Pangkalan Kerinci juga akan dipasok oleh perkebunan dan pemasok yang ada.[9]

Di sisi negatifnya, kunjungan lapangan dan dialog yang dilakukan menunjukkan kemajuan yang relatif kecil di beberapa bidang utama, sejak dialog tahun 2007 mengenai Pengelolaan Hutan Tanaman Secara Intensif. Hal ini mencakup: mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat; menjamin hak masyarakat atas tenurial tanah dan perhutanan sosial; mewujudkan dan melaksanakan rencana yang disepakati berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan; dan menyediakan pekerjaan yang lebih terjamin bagi pekerja. Di tengah konteks dinamika sosio-politik dan lingkungan hidup di Indonesia selama dua dekade terakhir, terbukti bahwa Mekanisme Pengaduan yang lebih baik dan efektif di dalam perusahaan sangatlah penting untuk memastikan keterlibatan dan kolaborasi yang berarti dengan para aktor sosial. Komitmen tingkat tinggi perusahaan terhadap tanggung jawab dan keberlanjutan tidak boleh ditenggelamkan oleh ketidakmampuan manajemen setempat untuk menyelesaikan konflik lokal yang sering terjadi karena kurangnya konektivitas. Oleh karena itu, kebutuhan terus-menerus akan konektivitas yang lebih luas di lanskap ini, baik di dalam maupun di antara operasi perusahaan yang berbeda, untuk mengamankan keanekaragaman hayati dan mendorong penyelesaian konflik yang efektif, sangatlah penting.

**Peserta dialog.**

Sejalan dengan misi TFD untuk mengatasi tantangan (“garis patahan”) yang dihadapi hutan, sangatlah menggembirakan bahwa para peserta pertemuan memilih untuk memprioritaskan diskusi mengenai masalah-masalah ini dalam musyawarah-musyawarah penutup dan menghasilkan sekumpulan solusi yang bijaksana. Bahkan dalam kelompok kerja yang berfokus pada Restorasi dan Konservasi,

9 Lihat lampiran A.

Pengelolaan Lahan Gambut dan Iklim, serta Produksi Berkelanjutan dan Intensifikasi, para peserta sangat menekankan perlunya kolaborasi dengan komunitas lokal, masyarakat sipil, perusahaan, dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dialog lapangan bertemakan Perkebunan Kayu di Lanskap ini juga menyentuh peran perusahaan dan pemerintah dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, dan dalam kaitannya dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Meskipun perusahaan kini dapat mengambil langkah-langkah sendiri untuk mengatasi masalah-masalah deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan akibat operasinya, serta dapat menjunjung tinggi hak dan penghidupan masyarakat dan pekerja, para peserta menekankan perlunya lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Menyadari bahwa pemerintah pusat, provinsi dan daerah mempunyai sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan konflik lahan, mendorong konservasi dan restorasi lahan gambut, para peserta menyatakan perlunya dialog berkelanjutan dan keterlibatan multipihak untuk memastikan solusi yang koheren dalam lanskap ini dan secara lebih luas di seluruh Indonesia.

Pertemuan ini mengakui bahwa komitmen APRIL untuk terlibat dengan Kerangka Kerja Remediasi yang baru dari Forest Stewardship Council (FSC) memberikan peluang penting untuk mengatasi beberapa tantangan yang belum teratasi ini. Kebijakan FSC yang baru ini, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023, akan memungkinkan APRIL (dan perusahaan lain) untuk berasosiasi kembali dengan FSC setelah melakukan kemajuan yang terverifikasi dalam memberikan remediasi atas kerusakan lingkungan dan sosial. Pertemuan ini diakhiri dengan apresiasi kepada APRIL atas keterbukaannya untuk menjadi tuan rumah bersama dengan NGO sosial dan lingkungan hidup, termasuk masyarakat yang terkena dampak. Melakukan hal ini di awal dari apa yang akan menjadi proses pengujian bagi perusahaan untuk memenuhi persyaratan FSC tentunya merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan, karena keterlibatan konstruktif dengan pemegang hak dan pihak berkepentingan lainnya akan sangat penting untuk menyukseskan upayanya ini.

## LAMPIRAN A: PEMBELAJARAN DAN REFLEKSI DARI KUNJUNGAN LAPANGAN KETUA BERSAMA

Refleksi ketua bersama Dialog mengenai kunjungan lapangan, khususnya mencatat perubahan dalam lanskap sosial dan ekologi sejak kunjungan lapangan terakhir selama dialog IMPF pada tahun 2007:

- **Pasokan serat:** Ada perubahan penting terkait pasokan serat sejak tahun 2007. Lebih banyak produk yang dihasilkan dari lahan yang sama seluas satu juta hektar. Kami mengetahui bahwa APRIL memproduksi 85% serat yang dibutuhkan untuk memasok pabriknya, dan 15% lainnya berasal dari pemasok dikenal, yang semuanya telah diaudit untuk nol deforestasi, standar lingkungan dan sosial, legalitas, dan keterlacakan penuh. Meskipun APRIL ingin memperluas produksi dan mendiversifikasi produk mereka lebih lanjut, mereka berharap perkebunan yang ada dapat menghasilkan tambahan 600.000 - 800.000 ton dengan menghilangkan hambatan-hambatan.

- **Peningkatan produktivitas:** Antara tahun 2016 dan 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam produktivitas APRIL dari 25,6 Peningkatan Metrik Tahunan (MAI) menjadi 29,4 MAI. Peningkatan produktivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk fokus pada budidaya bibit secara intensif di enam pembibitan besar, teknik pemuliaan selektif yang digunakan untuk mengembangkan bibit dengan produktivitas lebih tinggi, ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan angin, peningkatan kepadatan kayu, dan panjang serat yang lebih panjang. Penggunaan kultur jaringan dalam produksi bibit juga telah banyak dikembangkan oleh APRIL. Metode berteknologi tinggi ini memungkinkan peningkatan produktivitas, menghilangkan risiko hama dan penyakit, dan secara umum memungkinkan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi para pekerja. APRIL berharap dapat memperluas pemanfaatan kultur jaringan, meskipun biayanya saat ini sedikit lebih tinggi dibandingkan metode produksi bibit konvensional. Sekitar 40 juta bibit kultur jaringan diproduksi setiap tahunnya, dan tidak ada organisme hasil rekayasa genetika (GMO) yang terlibat dalam proses ini. Perbaikan silvikultur, perlakuan pupuk yang tepat, dan Pengendalian Hama Terpadu juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas.

- **Pemanenan yang lebih efisien:** percepatan pertumbuhan pohon memungkinkan pemanenan setelah 5 tahun dan mekanisasi mempercepat pemanenan, pengupasan kulit kayu dan pengangkutan, serta penggunaan limbah kulit kayu dan dahan sebagai mulsa (material penutup tanaman budidaya). Bibit baru langsung ditanam kembali dan diberi pupuk yang larut secara perlahan/bertahap. Transisi ini memerlukan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan pekerja serta penggunaan tenaga kerja kontrak yang lebih sedikit.

- **Pengelolaan NKT:** Ini merupakan perubahan yang signifikan sejak tahun 2007. NKT baru mulai dimanfaatkan pada tahun 2007, dan sejak saat itu, kita sekarang memiliki 3 penilaian NKT terpisah yang dapat dipelajari meskipun protokol pemantauan keanekaragaman hayati masih

sedang dikembangkan. Pembentukan koridor satwa liar masih dalam proses, dan disebutkan bahwa keanekaragaman hayati di kawasan perkebunan masih terbatas jika dibandingkan dengan hutan alam. APRIL menyatakan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan sebuah tantangan, terutama pada tanah mineral di mana kelapa sawit menawarkan alternatif yang menguntungkan dibandingkan konservasi dan perkebunan plasma Eucalyptus. Perlu ada diskusi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap NKT yang ditebangi sejak tahun 1994.

- **Tantangan pengelolaan lahan gambut:** Pengelolaan air merupakan titik fokus utama dari tantangan pengelolaan lahan gambut. Apa yang awalnya hanya sebuah ide pada tahun 2007 kini tengah diwujudkan. APRIL menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan air di kawasan lahan gambut. Permukaan air dikelola pada skala lanskap, dan dikelola serta dipantau secara terpusat 24 jam tanpa henti. Mereka berupaya menjaga kedalaman permukaan air pada angka 40-60 cm, namun hal ini masih mengakibatkan kekeringan dan penurunan permukaan tanah. Sejak tahun 2017, APRIL melapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengawasi pengelolaan air di lahan gambut. Disebutkan bahwa APRIL tidak melanjutkan upaya mereka untuk menemukan lebih banyak spesies yang toleran terhadap air untuk digunakan di lahan gambut guna memungkinkan permukaan air yang lebih tinggi.

- **Pengelolaan GRK:** Perubahan besar juga terjadi dalam pengukuran GRK sejak tahun 2007. Pengendalian kebakaran yang efektif, kebijakan nol deforestasi, dan peningkatan bioenergi dan tenaga surya telah menghasilkan penurunan emisi GRK. Telah ditunjukkan bahwa lahan terdegradasi di lahan gambut menghasilkan emisi yang tinggi, perkebunan di lahan gambut menghasilkan emisi tingkat sedang, dan hutan klimaks di lahan gambut kini menjadi penghasil emisi bersih, kemungkinan besar disebabkan oleh iklim yang lebih panas dan kering serta lebih seringnya El Niño. Temuan penelitian di konsesi APRIL di lanskap Kampar dan RER dengan menggunakan menara GRK mengukur emisi bersih CO2e, dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa ketika permukaan air menurun, emisi pun meningkat. Implikasinya terhadap pasar karbon tidak diangkat selama kunjungan lapangan namun dicatat sebagai bahan diskusi lebih lanjut selama dialog.

- **Pertimbangan Ketenagakerjaan:** Sebanyak 35.000 pekerja dipekerjakan di seluruh operasi APRIL di Riau. Di sektor pembibitan dan kultur jaringan, 90% tenaga kerja adalah perempuan yang bekerja dengan upah minimum dasar dengan tambahan pekerjaan borongan. Sebaliknya, pemanenan, penyiangan, dan penanaman sebagian besar dilakukan oleh laki-laki yang dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Merupakan hal yang menggembirakan melihat ada kemajuan yang dicapai sejak tahun 2007 sehubungan dengan kesempatan kerja yang setara, peningkatan keterampilan pekerja akibat mekanisasi terkait pengenalan teknologi dan inovasi baru, dan penguatan praktik kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, masih terdapat kekhawatiran mengenai jumlah tenaga kerja kontrak yang digunakan, meskipun subkontraktor diharuskan untuk mengikuti undang-undang dan konvensi ketenagakerjaan masing-masing. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa isu ketenagakerjaan perlu didiskusikan lebih lanjut.

- **Sertifikasi:** Sertifikasi digunakan secara luas oleh APRIL, 88% perkebunan APRIL bersertifikat PEFC, sedangkan 12% lainnya terdiri dari penanaman di area yang dikonversi setelah tahun 2000 (yaitu setelah batas waktu PEFC). Sertifikasi FSC kini sedang diupayakan mulai tanggal 1 Juli, sejalan dengan Kebijakan untuk Mengatasi Konversi dan Kerangka Kerja Remediasi FSC yang baru. APRIL akan memulai dengan penilaian independen, kemudian merencanakan dan melaksanakan Remediasi Lingkungan dan Sosial.

- **Konservasi Masyarakat dan Pengendalian Kebakaran:** APRIL telah bekerja bersama desa- desa, yang sengaja dipilih di dekat sisa hutan di luar HTI, dalam membangun kepercayaan dan pendekatan partisipatif (disarankan oleh Earthworm) untuk konservasi masyarakat dan pengendalian kebakaran. APRIL menandatangani MoU dengan masyarakat setelah pertemuan desa untuk mendukung pendekatan tersebut dan telah menciptakan program insentif dengan investasi sebesar US10k per tahun untuk proyek infrastruktur masyarakat. Patroli hutan direkrut dari masyarakat setempat dan digaji oleh perusahaan. APRIL menekankan bahwa kelompok demografi yang paling efektif untuk mengungkit perubahan dan meningkatkan kesadaran adalah anak-anak dan para ibu.

- **Suku Anak Rawa Penyengat dan Orang Akit Pulau Padang:** Penyengat adalah komunitas adat Suku Anak Rawa yang telah lama terbentuk dan diakui oleh Kesultanan Siak. Mereka mempunyai organisasi adat, wilayah dan tradisi adat, serta hukum adatnya sendiri. Mereka telah diakui oleh pemerintah kabupaten sebagai desa adat. APRIL memiliki perkebunan Akasia dan pelabuhan internasional utama di wilayah masyarakat ini, sementara sebuah perusahaan kelapa sawit, Triomas, juga memiliki perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Ada manfaat namun juga dampak negatif dari operasi industri perkebunan di wilayah tersebut. Misalnya, warga masyarakat menyebutkan dampak negatif terhadap penangkapan ikan, hilangnya hutan sagu, dan keluhan pribadi mengenai kurangnya dukungan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Dalam diskusi, dikemukakan bahwa pada akhirnya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk mengakui secara hukum hak atas wilayah dan hutan adat mereka, namun tentu saja masyarakat tidak mau menunggu hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, warga masyarakat ingin menyelesaikan sengketa lahan melalui proses yang bertanggung jawab dengan perusahaan.

- **Kampung Tengah (kampung Melayu):** Kita diingatkan bahwa 33% penduduk Riau adalah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Melayu. Komunitas ini juga mempunyai sejarah pergaulan yang panjang dengan Kesultanan Siak, dan masih mempertahankan adat istiadat dan tata kelolanya sendiri. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat mereka bersama-sama agama mereka (Islam). Hukum adat tetap dijalankan dengan tujuan untuk keadilan restoratif. Perlu dicatat bahwa standar FSC mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak adat, baik dari masyarakat adat maupun komunitas lokal. Kasus Kampung Tengah dengan demikian menjadi penting karena meskipun terdapat sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit yang bukan merupakan bagian dari grup perusahaan APRIL, kasus ini menggambarkan perlunya mengidentifikasi dan menjunjung tinggi hak-hak komunitas lokal yang sudah lama tinggal di sana.

## LAMPIRAN B: POIN-POIN DISKUSI TENTANG EMPAT TANTANGAN UTAMA

### TEMA 1: PRODUKSI BERKELANJUTAN DAN INTENSIFIKASI

1. **Dampak lingkungan dari perkebunan kayu di lahan gambut (penurunan permukaan lahan gambut, emisi iklim, kanalisasi)**
   - Keberlanjutan penanaman di tanah gambut
   - Tuntutan dari para pemangku kepentingan untuk menghindari lahan gambut, menimbulkan pembenaran untuk tetap berada di lahan gambut.
   - Terus mengurangi emisi pada lahan gambut.
   - Penurunan permukaan tanah gambut
   - Peraturan Pemerintah Perpres 71 Tahun 2014 jo. 57/2016 tentang Pengelolaan Lahan Gambut (persyaratan untuk menjaga permukaan air pada kedalaman 40 cm di bawah permukaan tanah gambut – kritik yang harus didasarkan pada penelitian ilmiah terkini).
   - Perkebunan di lahan gambut adalah dalam kawasan yang digolongkan sebagai hutan tetap. Karena izinnya akan habis masa berlakunya pada tahun 2033, opsi restorasi juga harus dijajaki
   - Kanalisasi
     - Dampak terhadap akses petani ke lahannya di musim hujan
       - Ada juga dampak positifnya misalnya terhadap penangkapan ikan
2. **Tantangan monokultur eksotik (kurangnya variabilitas genetik, manfaat spesies asli, risiko hama dan penyakit)**
   - Kurangnya variabilitas genetik
   - Diperlukan kehati-hatian saat menggunakan sejumlah kecil klon untuk meningkatkan produktivitas
   - Ada risiko bahwa area monokultur yang luas menjadi rentan terhadap hama, penyakit, dan kerusakan akibat angin
   - Ukuran blok maksimum untuk penanaman tunggal jarak dekat (mis. 100-150 ha)
   - Ketika kita berbicara tentang produksi berkelanjutan dan monokultur, kita perlu memikirkan tentang menjaga keanekaragaman hayati
   - Kemungkinan untuk mempraktikkan wanatani: perusahaan swasta berfokus pada monokultur namun apakah mereka dapat mempertimbangkan wanatani dalam konsesi mereka untuk meningkatkan ketahanan dan keanekaragaman hayati?
   - Kemungkinan manfaat spesies asli/lokal bagi keanekaragaman hayati dan kesehatan tanah
   - Pertimbangkan investasi yang lebih banyak pada spesies lokal untuk keanekaragaman dan menemukan spesies untuk restorasi lahan gambut.
3. **Menurunnya kesuburan tanah/penggunaan pupuk**
   - Jumlah pupuk yang digunakan dalam budidaya monokultur sangat banyak, bagaimana kita ke depannya dapat mengurangi jumlah pupuk kimia yang digunakan?
   - Kesehatan tanah: setelah penggunaan pupuk, akan seperti apa kondisi tanahnya dan bagaimana kita mengetahuinya serta mengantisipasi kemungkinannya?

*Lanjutan di halaman berikutnya*

**TEMA 1: PRODUKSI BERKELANJUTAN DAN INTENSIFIKASI** (LANJUTAN)

4. **Terbatasnya perkebunan kayu petani plasma dan lemahnya penerapan opsi hutan kemasyarakatan**
    - Kesesuaian lahan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Batasi jenis tanaman dan ekspektasi manfaat dari lahan tersebut
    - Masyarakat lokal tidak tertarik pada Akasia, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan sebaik kelapa sawit.
    - Minyak sawit menjamin pendapatan yang lebih pasti dan keuntungan finansial yang lebih besar
    - Masyarakat adat belum mengetahui manfaat ekonomi dari Akasia; terbatas: kurangnya pengetahuan dan modal tentang cara menanam Akasia
5. **Kurangnya pertukaran pengetahuan mengenai hama & penyakit, silvikultur, dan ilmu pengetahuan**
    - Produksi yang rentan terhadap hama dan penyakit: memerlukan mekanisme untuk berbagi pengetahuan dan data mengenai dampak dan tindakan pengendalian
6. **Dampak kelapa sawit terhadap lingkungan**
    - Persaingan penggunaan lahan dengan sektor lain. Kelapa sawit semakin meningkat sedangkan luas hutan semakin berkurang tidak hanya di Riau tetapi juga di wilayah lain di Indonesia, terutama Kalimantan
7. **Perubahan iklim: Bagaimana seharusnya praktik perkebunan kayu merespons perubahan iklim?**
    - Temukan pendekatan yang paling sesuai untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
    - Apa yang akan terjadi di masa depan akibat dampak perubahan iklim? Bagaimana kita dapat menemukan cara produksi dan intensifikasi yang mampu merespons perubahan iklim?
    - Apa implikasi dari offset dan nol bersih saat ini setelah penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut yang masih asli di lanskap tersebut merupakan penghasil emisi bersih dan tidak lagi menjadi penyerap karbon?

**TEMA 2: MASALAH-MASALAH SOSIAL**

1. **Kurangnya pengakuan hak adat, ketidakpastian penguasaan lahan**
   - Kurangnya kapasitas atau upaya pemerintah dalam membantu perusahaan mengatasi masalah-masalah penguasaan lahan
   - Kurangnya kejelasan penguasaan lahan dan kepastian hukum. Ini adalah salah satu permasalahan yang belum terlihat kemajuannya sejak tahun 2007
   - Perlunya memperjelas peran perusahaan dan lembaga pemerintah dalam menangani klaim penguasaan lahan
     - Provinsi sudah memetakan batas-batas adat namun tanpa hak formal, terjadi tumpang tindih dengan perusahaan swasta dan aktor lainnya
2. **Kurangnya komunikasi, kepercayaan, dan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat**
   - Perusahaan yang dimaksud di sini adalah tiga sektor korporasi utama - perusahaan HTI (perkebunan kayu/tanaman), kelapa sawit, dan pertambangan
   - Informasi yang disaring (tidak benar-benar valid) mengenai permasalahan sosial yang muncul dari lapangan
     - Informasi di lapangan masih disaring dan belum sampai ke perusahaan
     - Ada pemetaan partisipatif dan masyarakat menyampaikan kekhawatiran mereka namun pesan-pesan mereka tidak menggerakkan perusahaan untuk mengatasi permasalahan ini
   - Bagaimana menemukan pendekatan yang paling sesuai untuk memprioritaskan masyarakat adat dan komunitas lokal, di lokasi zona satu atau desa-desa lain dalam lanskap yang dibahas, melalui pendekatan yang peka secara kontekstual/budaya, dan relevan dalam konteksnya.
     - termasuk meningkatkan kapasitas staf lapangan perusahaan untuk bekerja bersama masyarakat.
     - Sehingga keduanya dapat saling memahami dan menghormati serta lebih sering mencapai kesepakatan
   - Identifikasi permasalahan komunitas yang terkena dampak HTI (masyarakat adat dan komunitas lokal) melalui pendekatan inklusif (sensus, analisis kebutuhan) dan berbasis hak, bagaimana kita dapat melibatkan semua orang melalui praktik partisipatif dan merumuskan solusi jangka panjang, termasuk potensi pemindahan penduduk, akses ke jasa ekosistem, hutan, mata pencaharian, bencana (banjir, tanah longsor), pendidikan, keamanan kerja, peningkatan kapasitas untuk kemitraan
   - Kurang berfungsinya mekanisme penyelesaian konflik atau mekanisme keadilan:
     - Kurangnya kapasitas Pemerintah dalam menangani konflik sosial.
     - Kurangnya akses ke penyelesaian hukum (penegakan hukum): analisis kesenjangan diperlukan agar masalah ini dapat dipahami
   - Perlunya pemantauan dan evaluasi yang transparan terhadap dampak perusahaan terhadap masyarakat sebagai dasar diskusi terinformasi dan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terselesaikan
3. **Dampak negatif lingkungan hidup dari perkebunan kayu dan kelapa sawit terhadap masyarakat (yaitu banjir, serpihan kayu)**
   - Dampak perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu: banjir.
   - Penggunaan bahan kimia dalam silvikultur dan pengendalian hama
   - Dampak limbah kayu dan lalu lintas kapal terhadap nelayan

*Lanjutan di halaman berikutnya*

**TEMA 2: MASALAH-MASALAH SOSIAL** (LANJUTAN)

4. **Perlunya pembangunan masyarakat (pendidikan, peningkatan kapasitas dan keterampilan, usaha rintisan (start-up) petani kecil, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan)**
   - Akses ke pendidikan bagi masyarakat. Bagaimana perusahaan dapat membantu dalam hal ini?
   - Pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan dan peningkatan kapasitas pemuda.
   - Inklusivitas: Tidak ada seorang pun dalam masyarakat yang terabaikan
   - Pendidikan: Peluang mendapatkan beasiswa melalui perusahaan
   - Peluang bagi usaha rintisan skala kecil – apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kawasan ini, pengembangan bisnis lokal, dan pelatihan kewirausahaan lokal
   - CSR dan kecemburuan sosial, ketika CSR dianggap hanya menguntungkan sebagian masyarakat, hal ini dapat menimbulkan ketegangan
   - Pengentasan kemiskinan
   - Kurangnya identifikasi kebutuhan masyarakat – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) seharusnya tidak hanya berfokus pada uang, namun juga pada peningkatan kapasitas dan mendorong pengembangan keterampilan.
   - Perubahan sosial ekonomi masyarakat lokal yang mulai berminat bekerja di perkebunan.

5. **Menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan serikat pekerja untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan**
   - Terbatasnya diskusi mengenai permasalahan pekerja selama kunjungan lapangan, pemaparan mengenai situasi sumber daya manusia agak parsial per departemen.
   - Mekanisasi, bentuk-bentuk intensifikasi lain dan sistem kerja yang lebih efisien telah diperkenalkan, yang mengkategorikan pekerja menjadi pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Tenaga kerja terampil perlu dimasukkan dalam pelatihan lanjutan yang diberikan oleh perusahaan (misalnya operator mesin pemanen, penelitian dan pengembangan, operator teknologi perkebunan, peran pengawasan), sebagian besar dipekerjakan langsung oleh perusahaan dengan tunjangan kerja yang baik. Tenaga kerja tidak terampil sebagian besar disubkontrakkan, terlihat di pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan manual, dengan tingkat kesejahteraan atau kondisi kerja dan kemampuan tawar-menawar kolektif yang lebih rendah.
   - Pekerjaan sebagai buruh hutan tidak dipandang tinggi oleh masyarakat, sehingga tidak menarik masyarakat lokal untuk mencari pekerjaan di perusahaan jika hanya ditawarkan untuk posisi buruh tidak terampil. Jumlah pekerja migran melebihi jumlah pekerja lokal.
   - Sebagian besar pekerja subkontrak tidak bergabung dengan serikat pekerja, sehingga pekerjaan yang layak tidak ditangani dengan baik (misalnya jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan, risiko kehadiran pekerja anak terutama ketika pekerjaan subkontrak melibatkan pekerja keluarga, dan masalah upah).

6. **Pengakuan dan dukungan terhadap budaya dan identitas adat**
   - Perkuat identitas lokal

7. **Perlunya penguatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, peraturan yang berdampak pada mereka, dan peluang-peluang**
   - Terkait peraturan pemerintah yang tidak dilaksanakan, masyarakat mengatakan bahwa perekrutan seharusnya mengutamakan masyarakat lokal, namun mereka enggan dan tidak menyadari bahwa mereka diprioritaskan.
   - Masyarakat memahami hak-hak dan peluang-peluang yang mereka miliki
   - Ketika remediasi FSC dimulai, perlu dipastikan bahwa masyarakat mampu bernegosiasi secara efektif.

*Lanjutan di halaman berikutnya*

**TEMA 2: MASALAH-MASALAH SOSIAL** (LANJUTAN)

8. **Tata Kelola: Bagaimana mengoptimalkan kolaborasi antar aktor dalam lanskap yang menghadapi dampak dan tantangan sosial serupa**
    - Bagaimana APRIL dapat berkontribusi terhadap pendekatan lanskap yang lebih inklusif dan berdampak di Riau.
    - Dalam pendekatan lanskap terdapat banyak pemangku kepentingan, namun masih menjadi tantangan untuk menyatukan berbagai kepentingan guna menyelaraskan tujuan produksi berkelanjutan yang dapat beradaptasi dengan iklim.
    - Konsesi APRIL berdampingan dengan perusahaan lain seperti perkebunan kelapa sawit dan kebun kelapa sawit masyarakat. Bagaimana menyelaraskan rencana penggunaan lahan secara bersama-sama?
    - Perlu menemukan cara untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi, pemahaman tentang tata kelola yang berbeda, meningkatkan transparansi, keterbukaan (tidak ada janji palsu). Hal ini juga melibatkan pemerintah dan transparansi serta kejelasan di berbagai sektor dan kementerian.
    - Hal serupa juga perlu melibatkan entitas lain dalam lanskap seperti NGO dan komunitas lokal
    - Bagaimana mengembangkan kesamaan pemahaman mengenai peraturan dan praktik. Pemangku kepentingan yang berbeda dapat mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda mengenai peraturan⇢ cara implementasi yang berbeda.

Peserta dialog.

### TEMA 3: PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DAN IKLIM

1. **Kurangnya pengelolaan lahan gambut terpadu di lanskap**
   - Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melindungi dan mengelola lahan gambut.
   - Rencana dan prioritas strategis pemerintah – pemerintah mempunyai kebijakan dan peruntukan (lumbung pangan, lahan gambut yang tidak dikelola, dan lahan gambut yang dikelola)
   - Kurangnya inovasi teknologi untuk solusi hidrologi yang hemat biaya dan dapat diadopsi oleh masyarakat
   - Kurangnya pengelolaan lahan gambut terpadu terutama disebabkan oleh lemahnya regulasi, tidak adanya tata kelola dan penerapan pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab/akuntabel.
   - Bagaimana memperkuat kearifan lokal masyarakat adat melalui pemberdayaan/pendekatan yang menghormati kearifan lokal mereka (misalnya masyarakat adat dari Riau dapat membaca kesehatan hutan dan ekosistem dengan mendengarkan suara satwa hutan- mereka dapat memahami perubahan ekosistem mereka dengan mendengarkan suara hutan).
   - Bangun dukungan masyarakat lokal mengenai restorasi dan memastikan manfaatnya bagi perekonomian
2. **Bagaimana berbagai pemangku kepentingan lanskap dapat menyadari nilai gambut**
   - Perlu memahami bahwa Gambut terkadang dianggap tidak memiliki nilai bagi masyarakat, kita perlu mengubah cara pandang terhadap nilai tersebut. Pahami apa nilainya? Apa peran pasar karbon?
   - Bagaimana perusahaan dapat memperoleh insentif yang lebih besar untuk melestarikan lahan gambut?
   - Lahan gambut merupakan permasalahan global, namun negara-negara maju terus memicu degradasi lahan gambut dan memberikan tekanan kepada negara-negara miskin.
   - Bangun dukungan masyarakat lokal mengenai restorasi dan memastikan manfaatnya bagi perekonomian
3. **Kesenjangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan mengenai ekologi, iklim, dan pengelolaan lahan gambut**
   - Masih terdapat kesenjangan besar dalam pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati lahan gambut, ekologi, jasa lingkungan, dan ilmu pengetahuan (emisi, dampak perkebunan terhadap lahan gambut, isu-isu iklim-lahan gambut lainnya).
   - Kurangnya investasi pada ilmu pengetahuan lokal mengenai gambut dan emisi GRK; sebagian besar ilmu pengetahuan berasal dari negara-negara maju.
   - Perlu lebih banyak data mengenai penyerapan bersih atau emisi bersih dari gambut.
4. **Perlunya sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan di lahan gambut**
   - Bagaimana menemukan model-model yang paling sesuai dari sumber penghidupan berbasis lahan gambut yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
     - Banyak intervensi mata pencaharian dan pemberdayaan yang bersifat percontohan, tanpa bukti nyata mengenai dampaknya terhadap pemulihan lahan gambut atau ketahanan iklim (selain pencegahan kebakaran).
     - Jajaki bagaimana masyarakat lahan gambut dapat mengelola lahan gambut dan memiliki mata pencaharian yang memadai.
     - Libatkan masyarakat secara efektif dan adil dalam pengelolaan lahan gambut
   - Kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan termasuk dalam pendekatan skala lanskap

## TEMA 4 RESTORASI DAN KONSERVASI

1. **Konflik manusia dan satwa liar**
   - Masalah dengan konflik manusia-satwa liar
   - Masalah dengan perburuan liar dan perdagangan satwa liar termasuk burung penyanyi
2. **Tantangan dalam mengukur dan menilai keanekaragaman hayati (kesulitan, biaya, kredit keanekaragaman hayati)**
   - Kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai penilaian dan monetisasi keanekaragaman hayati
   - Bagaimana cara mengevaluasi keanekaragaman hayati? Tidak ada metode pengukuran dan evaluasi yang disepakati. Perlu indikator yang baik untuk memantau keanekaragaman hayati.
   - Pengembangan baseline keanekaragaman hayati memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal.
3. **Perlu mengoptimalkan rencana tata ruang kawasan konservasi dan perkebunan kayu dalam suatu lanskap (untuk konektivitas, jasa ekosistem, karbon)**
   - Kawasan konservasi tersebar dan perlu dihubungkan. Bagaimana kita melakukannya?
   - Jaringan konservasi dan terkadang tidak ada kesepakatan lanskap antara pengelola lahan dan pemerintah.
   - Pahami dan tingkatkan konektivitas struktural dan fungsional petak-petak hutan asli di seluruh lanskap tersebut
4. **Perlunya keterlibatan masyarakat yang efektif dan adil dalam restorasi, konservasi, dan pengelolaan lahan gambut.**
   - Konservasi berbasis komunitas, apakah komunitas yang sehat itu? Perlu memikirkan dan menghubungkan antara komunitas dan konservasi.
   - Apa insentif bagi masyarakat agar bersedia merestorasi bentang alam selain perdagangan karbon?
   - Bagaimana masyarakat dapat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mereka
   - Bagaimana membangun kemitraan lanskap untuk mengelola tumpang tindih penggunaan lahan antara manusia dan satwa liar (termasuk Prosedur Operasi Standar untuk pertemuan/koeksistensi manusia-satwa liar yang aman, mengurangi perburuan spesies-spesies kunci di hutan gambut dan wilayah konsesi khususnya perkebunan seraya memastikan tersedianya sumber pangan (protein berbasis daging) bagi masyarakat. Jika hutan yang dikelola masyarakat memerlukan akses terhadap daging yang dikonsumsi masyarakat.
5. **Ketidakpastian dan munculnya peluang pasar karbon (pengaruhnya terhadap pengelolaan lahan gambut, restorasi)**
   - Pahami nilai dan potensi peran pasar karbon
   - Jajaki peluang restorasi lahan gambut yang terdegradasi, termasuk konektivitas fungsional (penyebaran benih), restorasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon, dan pemulihan sumber penghidupan masyarakat
   - Terima ketidakpastian dan potensi ketidakstabilan perdagangan karbon karena sayangnya terdapat ketidakpastian peraturan dan mekanisme perdagangan karbon masih belum jelas dan masih diperdebatkan.